

**TANGGAPAN BP TERHADAP  
LAPORAN KEDUA  
PANEL PENASIHAT INDEPENDEN TANGGUH KEDUA (*TIAP-2*)  
MENGENAI  
TANGGUH LNG  
OKTOBER 2012**

## **SINGKATAN DAN ISTILAH**

ADB	Bank Pembangunan Asia
AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
BHBEP	Program Pemberdayaan Usaha Kawasan Kepala Burung
BLKI	Balai Latihan Kerja Industri
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPMIGAS	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bupati	Kepala Daerah Kabupaten
CAP	Rencana Aksi Masyarakat – program dukungan untuk memfasilitasi proyek pembangunan berbasis masyarakat di desa-desa yang terkena dampak langsung
DAV	Desa yang sejak awal diidentifikasi sebagai daerah yang terkena dampak langsung proyek Tangguh
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPR-PB	Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat
EITI	Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif
GOI	Pemerintah Indonesia
ICBS	Program Keamanan Terpadu Berbasis Masyarakat
ISP	Program Sosial Terpadu – unit pelaksana dalam lingkungan proyek Tangguh dan program pengembangan sosial ekonomi yang dikelola oleh unit tersebut.
JUKLAP/PAMBERS	Petunjuk Lapangan Pengamanan Bersama
Kabupaten	Distrik atau Kabupaten
KADIN	Kamar Dagang dan Industri Indonesia
KAPOLDA	Kepala Kepolisian Daerah
KODIM	Komando Distrik Militer
Kostrad	Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat
<i>kota</i>	Kota
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
LSHAM	Lembaga Swadaya Masyarakat Hak Asasi Manusia Papua
LP3BH	Lembaga Penelitian, Pengembangan, Pengkajian Bantuan Hukum
LNG	Gas Alam Cair
Mmscfd	Juta kaki kubik per hari
MCB	Gedung Pengendali Utama
MCC	Mediatama Cipta Citra – LSM Lokal di bidang Tata Kelola
MOE	Kementerian Lingkungan Hidup
MRP	Majelis Rakyat Papua

NGO	Lembaga Swadaya Masyarakat
PANGDAM	Panglima Komando Daerah Militer
PERDASUS	Peraturan Daerah Khusus
PLN	Perusahaan Listrik Negara
POB	People on Board – jumlah pekerja di sebuah fasilitas pada satu waktu tertentu
POFD	Rencana Pengembangan Lanjutan
POLDA	Kepolisian Daerah
POLRES	Kepolisian Resor
POLSEK	Kepolisian Sektor
PSC	Kontrak Kerja Sama
PSKK UGM	Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada
RAV	Desa yang terkena dampak pemukiman kembali yang memang teridentifikasi oleh Proyek Tangguh – Tanah Merah Baru, Saengga, dan Onar
S&OR	Risiko Keselamatan dan Operasional
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SOA	Kesepakatan Pembelian Produksi Pertambangan
SPA	Kesepakatan Jual beli
TIAP	Panel Penasihat Independen Tangguh
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TPC	Kontrak Pihak Ketiga
UKP4	Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
UNIPA	Universitas Negeri Papua di Manokwari, Papua Barat
UP4B	Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
YSA	Yayasan Sosial Agustinus (mitra pelaksana untuk Kesehatan)
YPTB	Yayasan Pembangunan Teluk Bintuni

## **PENDAHULUAN**

BP mengucapkan terima kasih kepada Panel Penasihat Independen Tangguh (TIAP-2) atas laporan kedua serta kritik dan saran yang diberikan kepada BP. Fokus utama TIAP-2 adalah masalah keamanan, hak asasi manusia, tata kelola dan manajemen pendapatan, serta isu-isu non-komersial lain. Isinya melengkapi kajian independen Panel Eksternal yang dilaksanakan oleh Grup Pemberi Pinjaman Tangguh.<sup>1</sup>

Saran-saran yang diberikan panel penasihat yang saat ini tengah menjabat (TIAP-2) dan pendahulunya (TIAP-1) sangat berharga untuk mendukung upaya kami menjadikan Proyek Tangguh sebagai barometer keberhasilan kerja sama dengan masyarakat lokal dan mitra lain untuk mengelola isu-isu sosial, ekonomi dan lingkungan yang kompleks. TIAP-2 membantu kami memastikan Tangguh LNG memberikan manfaat bagi BP, masyarakat lokal, pemerintah, karyawan, konsumen dan investor.

TIAP-2 melakukan kunjungan pertama ke Tangguh pada tanggal 28 September hingga 5 Oktober 2010, dan menerbitkan laporannya pada bulan Januari 2011. Laporan tersebut memuat 21 rekomendasi yang mencakup: Keamanan dan Program Keamanan Terpadu Berbasis Masyarakat (ICBS); Pengembangan Masyarakat Asli Papua; Hak Asasi Manusia; Tata Kelola dan Manajemen Pendapatan; serta Arus Pendapatan dan Transparansi. BP telah memberikan tanggapan terhadap laporan ini dan menerapkan berbagai rekomendasi tersebut. Perkembangan langkah-langkah yang kami ambil terlampir dalam Apendiks A.

TIAP-2 melakukan kunjungan keduanya pada tanggal 14 Juli hingga 25 Juli 2012, yang untuk pertama kalinya diketuai oleh Senator Tom Daschle. Meski tidak mengunjungi Jayapura karena masalah keamanan, TIAP-2 mengadakan pertemuan khusus dengan pemangku kepentingan utama dari kota tersebut di lokasi yang aman di Biak dan Jogjakarta.

Setelah kunjungan kedua ini, TIAP-2 menyoroti berbagai keberhasilan yang harus dipertahankan Tangguh di masa depan serta hal-hal yang masih harus ditingkatkan. TIAP-2 juga membantu mengidentifikasi peluang dan risiko terkait proyek pengembangan Tangguh yang akan berlangsung selama 2 hingga 5 tahun mendatang.

Kami sangat menghargai analisis mendalam dan tajam dalam laporan komprehensif ini dan yakin laporan ini amat bermanfaat untuk menghadapi tantangan dalam meningkatkan kontribusi Tangguh bagi pembangunan sosial.

### **Proyek Tangguh LNG**

Tangguh LNG memproduksi dan mengeksplor gas alam cair (LNG) dari Lapangan Vorwata yang terletak di Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, Indonesia, sekitar 3.000 kilometer di sebelah timur Jakarta.

Gas ditemukan di Teluk Bintuni pada tahun 1994 dengan cadangan terbukti sebanyak 14 triliun kaki kubik (*tcf*) setelah dieksplorasi. Gas diekstraksi melalui sumur yang digali menggunakan dua platform berkaki enam tak berawak yang dikendalikan dari jauh yaitu Vorwata-A dan Vorwata-B, kemudian dialirkan ke kilang pengolahan di sebelah selatan teluk melalui pipa bawah laut sepanjang 22 kilometer. Kilang ini mengoperasikan dua *train* atau perangkat pengolahan LNG dengan kapasitas produksi sekitar 7,6 juta ton (3,8 juta ton/train) LNG per tahun selama 25 tahun (setara dengan efisiensi operasional tahunan sebesar 93% kapasitas desain). LNG disimpan di dua tangki berkapasitas 170.000 meter kubik dan dialirkan melalui pipa ke dermaga untuk selanjutnya dimuat ke dalam kapal tanker.

Produksi LNG pertama kali dimulai pada Juni 2009, dan pengiriman pertama dilakukan sebulan setelahnya menggunakan kapal tanker ke Korea Selatan. Hingga September 2012, 283 kargo LNG dan 67 kondensat

---

<sup>1</sup> Laporan dari Grup Pemberi Pinjaman tersedia pada situs web Bank Pembangunan Asia: <http://www.adb.org/Projects/project.asp?id=38919>

telah dikirimkan dari Tangguh dengan efisiensi operasional tahunan kilang di tahun 2012 per tanggal 30 Agustus mencapai 94,2%.

Tangguh memiliki enam Kesepakatan Jual Beli (SPA) untuk memasok LNG ke Posco dan K-Power Co di Korea Selatan; Sempra LNG di Meksiko; CNOOC Fujian di China; serta Tohoku Electric Power Company Inc. dan Chubu Electric Power di Jepang. BP saat ini tengah mencari peluang lain untuk memaksimalkan potensi komersial Tangguh.

Ke depannya, Tangguh berkomitmen melanjutkan kegiatan operasional yang andal dan meningkatkan efisiensi operasional *Train 1* dan *2* pada kapasitas penuh. BP pun tengah menjalankan proyek untuk mengakses cadangan baru dan memaksimalkan profitabilitas Tangguh. Rencana untuk membangun dan mengoperasikan satu atau lebih *train* pemrosesan LNG saat ini dalam tahap konsep, sedangkan Rencana Pengembangan Lanjutan (POFD) telah diajukan ke BPMIGAS di bulan September 2012.

### **Kunjungan dan Rekomendasi TIAP**

TIAP-2 mengunjungi Tangguh mulai tanggal 14 sampai 25 Juli 2012, mendatangi Jakarta dan Papua untuk bertemu pejabat pemerintah, LSM, pejabat kepolisian dan TNI serta pejabat Kedutaan AS dan Inggris di Indonesia. Di Jakarta, panel menemui pihak Kementerian Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), EITI dan UP4B. Panel juga mengunjungi Teluk Bintuni untuk menemui pemimpin masyarakat lokal, warga desa dari pesisir utara dan selatan, tenaga kerja Papua terampil yang dipekerjakan BP dan Tangguh serta tim keamanan.

TIAP-2 memfokuskan perhatiannya pada Keamanan dan Hak Asasi Manusia, Tata Kelola dan Manajemen Pendapatan, serta mempertimbangkan topik lain yang memiliki dampak tak langsung pada keamanan seperti Ketenagakerjaan, Mata Pencarian, Migrasi Masuk, Pengadaan, dan rencana Ekspansi Tangguh.

Laporan pertama memuat komentar dan rekomendasi terkait topik-topik tersebut.

### **Rekomendasi: Keamanan dan Hak Asasi Manusia**

#### **1. BP harus mewajibkan kontraktor keamanan swasta baru untuk mempertahankan petugas keamanan asli Papua yang memiliki kinerja baik.**

Tanggapan BP:

Kami setuju dan telah mewajibkan kontraktor keamanan baik dulu atau sekarang (sampai saat ini sudah tiga perusahaan berbeda) untuk mempertahankan petugas keamanan asli Papua yang sedang bekerja di posisi masing-masing.

#### **2. BP harus bekerja sama dengan Genting Oil dan perusahaan lain yang melakukan eksplorasi di Teluk Bintuni, serta dengan pejabat pemerintah dan keamanan untuk mendorong penerapan prinsip ICBS dalam operasi keamanan mereka dan minimal memberikan pelatihan hak asasi manusia bagi personel polisi atau TNI yang ditugaskan sebagai tenaga keamanan.**

Tanggapan BP:

Kami telah aktif mengajarkan pendekatan ICBS dan manfaatnya kepada Genting Oil yang saat ini tengah mengeksplorasi blok Kasuri yang berdekatan dengan Tangguh. Melalui kerja sama yang baik selama proses penelitian seismik mereka dalam perimeter Tangguh LNG, tim Genting mulai menerapkan prinsip ICBS. Genting pun mengindikasikan akan menerapkan ICBS sepenuhnya, karena mereka meminta Tangguh untuk berbagi pengalaman secara lebih intensif dalam hal perancangan dan implementasi ICBS untuk operasi pengeboran dan seismik mereka di masa depan. BPMIGAS mengakui hal ini dan Tangguh diminta memberikan penyuluhan lebih luas kepada PSC lain terutama yang beroperasi di Provinsi Papua dan Papua Barat. Melalui inisiatif BPMIGAS, kami juga memberitahukan keunggulan konsep ICBS kepada

perusahaan-perusahaan besar lain yang beroperasi di wilayah Indonesia timur seperti Inpex. Sesi penyuluhan untuk perusahaan tambang raksasa PT Freeport Indonesia juga telah dilaksanakan.

Kepolisian Daerah (Polda) Papua secara konsisten mempromosikan ICBS dalam diskusinya dengan perusahaan lain yang beroperasi di Papua. Baru-baru ini, LSM lokal LP3BH, yang memberikan penyuluhan hukum dan hak asasi manusia, menulis artikel di surat kabar lokal untuk mempromosikan penerapan ICBS oleh semua perusahaan yang melakukan eksploitasi sumber daya alam di Papua.

Jika tindak pengamanan perusahaan lain mengancam operasi kami di masa depan, kami akan mempromosikan manfaat ICBS dengan lebih gencar melalui lembaga pemerintah yang relevan termasuk BPMIGAS dan kepolisian.

**3. Latihan bersama tahunan sesuai kesepakatan dengan kepolisian harus dilakukan tiap tahun. Jika latihan penuh tak dapat dilaksanakan, BP harus bekerja sama dengan kepolisian dan TNI untuk menjadwalkan latihan yang lebih terbatas.**

Tanggapan BP:

Kami setuju. Kami berkomitmen menerapkan seluruh aspek ICBS, termasuk rekomendasi latihan bersama tersebut. Jika tidak memungkinkan bagi kepolisian dan militer Jayapura untuk berpartisipasi dalam latihan penuh, kami akan menggelar latihan skala lebih kecil yang melibatkan kepolisian kecamatan dan kabupaten.

Untuk tahun ini, kami sudah menjadwalkan latihan skala penuh di bulan November 2012. Pertemuan perdana telah diselenggarakan oleh BPMIGAS di Jakarta pada tanggal 23 Oktober dihadiri oleh Direktur Pengamanan Objek Vital Nasional Kepolisian (Dirpamobvit) dan BP.

**4. ICRC atau organisasi pelatihan hak asasi manusia profesional lain sebaiknya dilibatkan secara berkala untuk membarui program pelatihan bagi tenaga keamanan dan memastikan program tersebut sesuai perkembangan zaman dan lengkap.**

Tanggapan BP:

Kami setuju. LP3BH, sebuah LSM lokal di bidang penyuluhan dan pelatihan hukum dan hak asasi manusia, kini membantu kami mengulang dan memperbaharui proses pelatihan bagi tenaga keamanan di Papua Barat.

**Rekomendasi: Hubungan Pemerintah dan Urusan Publik**

**1. Kantor penghubung yang lebih kuat harus didirikan di Manokwari untuk mempertahankan hubungan dengan Gubernur, pejabat senior, DPRD dan MRP serta untuk memberikan informasi kepada mereka semua mengenai program dan isu di Tangguh. Selain itu pejabat senior BP Indonesia harus mengunjungi Manokwari ketika mengunjungi Tangguh; Gubernur dan pejabat senior DPRD harus diundang ke Tangguh; dan Gubernur harus diundang untuk bertemu pejabat senior BP ketika mengunjungi Jakarta.**

Tanggapan BP:

Kami setuju. Kami tengah memperkuat hubungan kami dengan Gubernur, DPR-PB dan MRP, dengan mewajibkan koordinator penghubung senior kami untuk menghabiskan 30% waktunya di Manokwari dan memberikan kabar terbaru mengenai operasi dan rencana pengembangan Tangguh kepada para pejabat dan instansi tersebut. Kami juga mempererat hubungan sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan pembahasan Perdasus mengenai dana bagi hasil minyak dan gas. Kami bertekad mempertahankan hubungan baik yang telah terbina dengan pemerintah Papua Barat dan pemangku kepentingan lain sesuai rekomendasi TIAP-2.

**2. Tangguh harus memperkuat citranya di Teluk Bintuni, Papua dan di tingkat nasional. Melalui kerja sama dengan BPMigas, misalnya, BP dapat mengaitkan nama Tangguh dengan pemasangan jaringan listrik baru di Teluk Bintuni. Beasiswa yang diberikan untuk mahasiswa lokal di UNIPA dan universitas lain dapat dinamakan sebagai beasiswa Tangguh. BP atau Tangguh juga dapat menyumbangkan peralatan penting kepada rumah sakit yang baru dibangun, atau memberi manfaat lain yang dapat langsung diasosiasikan dengan Tangguh.**

Tanggapan BP:

Kami menyambut baik dan memahami pemikiran di balik rekomendasi ini. Kami akan merancang strategi hubungan masyarakat untuk memperkuat profil Tangguh dan memastikan upaya kami di tengah masyarakat lokal mendapat pengakuan dengan cara-cara yang memungkinkan bagi kami untuk mengelola ekspektasi eksternal.

**3. Kegiatan urusan publik di Jakarta harus ditingkatkan. Penyediaan informasi bagi media dan pejabat senior pemerintah harus digiatkan. Bila perlu, pejabat senior pemerintah sebaiknya diundang ke Tangguh.**

Tanggapan BP:

Kami telah meningkatkan kegiatan hubungan masyarakat seiring pengembangan Tangguh. Kami telah menjadwalkan kunjungan figur-figur penting ke Tangguh tahun ini, termasuk perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup, Komisi 7 DPR bidang Energi dan Pertambangan, Badan Intelijen Negara, Kepala dan Deputi BPMIGAS, UP4B, UKP4 serta beberapa pejabat pemerintah lokal. Kami juga memanfaatkan hal-hal yang kami pelajari dari perusahaan lain untuk memperkuat citra Tangguh di mata media dan pejabat senior pemerintah.

**4. Setiap tahun BP harus menggelar pertemuan dengan seluruh pemangku kepentingan di Teluk Bintuni yang melibatkan pemerintah, masyarakat dan pihak terkait lain. BP harus melaporkan program-program Tangguh dan meminta masukan dari semua pihak mengenai kinerja dan rencana BP di masa depan.**

Tanggapan BP:

Kami berinteraksi dengan pemangku kepentingan di Bintuni melalui pendekatan yang lebih terfokus melalui pertemuan-pertemuan skala kecil dengan pemerintah lokal, masyarakat, media, penduduk setempat dan pihak terkait lain. Tahun ini kami menggelar berbagai pertemuan dengan kelompok-kelompok tersebut sebagai bagian dari proses konsultasi publik untuk membahas rencana proyek Pengembangan Tangguh.

#### **Rekomendasi: Program untuk DAV dan Teluk Bintuni**

**1. BP harus bekerja sama dengan YSA untuk memfokuskan peningkatan kualitas perawatan malaria dan pencegahan HIV di desa-desa yang kedatangan banyak pekerja asing sebagai akibat kegiatan eksplorasi perusahaan lain di wilayah tersebut.**

Tanggapan BP:

Kami setuju. Kami bekerja sama dengan YSA dan Dinas Kesehatan Bintuni untuk menanggulangi risiko kesehatan yang diakibatkan kedatangan para pekerja asing yang dipekerjakan perusahaan lain.

**2. BP harus berkonsultasi dengan Bupati untuk mencari tahu apakah ada peningkatan penting atau kebutuhan lain yang dapat disediakan Tangguh bagi rumah sakit Bintuni yang baru.**

Tanggapan BP:

Kami telah menyediakan *blue print* sistem manajemen dan meminta agar rumah sakit tersebut melakukan pemeriksaan medis rutin bagi karyawan Tangguh dan kontraktor. Kami akan terus berinteraksi

dengan Bupati untuk mencari tahu apakah ada kebutuhan lain untuk meningkatkan layanan rumah sakit itu serta bekerja sama dengan perusahaan lain yang beroperasi di Bintuni untuk mengoordinasikan dukungan kami di masa depan.

**3. BP harus bekerja sama dengan British Council untuk menciptakan tolak ukur, pengawasan atau metode evaluasi tambahan guna memastikan integritas hasil ujian pendidikan di Teluk Bintuni.**

Tanggapan BP:

Kami setuju. Ke depannya, kami akan berhubungan langsung dengan pihak sekolah untuk menilai integritas dan validitas ujian nasional. Untuk mendukung peningkatan standar pendidikan, kami telah menjalankan beberapa program yang difokuskan kepada pendidikan dasar: pelatihan dan pembekalan guru; peningkatan kualitas infrastruktur; pengembangan kurikulum; dan peningkatan kualitas perangkat dan sistem. Kami hendak mengukur kemajuan secara lebih efektif dengan menyertakan indikator-indikator utama (misalnya rasio guru-murid dan kompetensi guru) dalam survei ekonomi dua tahunan sekali dan laporan evaluasi kami. Kami akan menjalankan peningkatan-peningkatan ini melalui British Council (BC) sebagai mitra pelaksana kami atau lembaga pendidikan lain.

**4. BP harus mencari peluang untuk menambah rantai nilai bagi bisnis di Teluk Bintuni dalam program-program usaha mikro dan pengadaan yang dijalankannya.**

Tanggapan BP:

Kami setuju dan tengah mengembangkan program mata pencaharian sesuai dengan rekomendasi ini. Contoh spesifiknya adalah bengkel sepeda dan gerai di Babo yang menjual produk yang dihasilkan DAV. Pemasangan listrik di tahun 2013 juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan mendorong munculnya usaha mikro dan bisnis komersial baru.

Saat ini, tujuh titik penyimpanan telah didirikan dan beroperasi di Bintuni, Arguni, Tanah Merah, Babo, Tofoy, Taroy dan Weriagar untuk mengumpulkan semua produk masyarakat untuk disuplai ke catering Tangguh. Dua titik penyimpanan baru juga tengah dibangun di Onar dan Weriagar. Di bulan Januari-September 2012, total 268 ton buah-buahan, sayuran, ikan, kepiting dan udang senilai Rp6,7 miliar telah dikirim ke catering Tangguh LNG. BP tengah mengkaji pasar alternatif seperti Bintuni, Sorong dan Makassar untuk memperluas peluang.

**5. Sensus DAV yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali harus dilanjutkan sepanjang operasi Tangguh dan, sebagai pembanding dan untuk mendapat gambaran lebih luas, harus terus mengikutsertakan sampel non-DAV di tiap sensus.**

Tanggapan BP:

Kami setuju. Kami telah menunjuk lembaga-lembaga independen untuk melaksanakan sensus ekonomi dan sosial dua tahun sekali sesuai komitmen kami dalam buku panduan ISP-2. Sensus yang berikutnya akan terus melibatkan DAV dan sampel non-DAV, sebagai kelompok pembanding.

**6. BP harus bekerja sama dengan Bupati untuk meningkatkan dan menggiatkan Yayasan Pembangunan Teluk Bintuni (YPTB), bisa jadi dengan memberikan dana perwalian (*trust fund*) guna mendukung yayasan tersebut dan kebutuhan masyarakat adat lainnya.**

Tanggapan BP:

Kami setuju. Kami akan bekerja sama dengan Bupati untuk memperpanjang MoU dengan YPTB, memberikannya peran lebih substansial dalam pembangunan infrastruktur di Teluk Bintuni, termasuk persiapan awal layanan transportasi publik serta perbaikan tata kelola YPTB. Kami akan memasukkan pembentukan dana perwalian (*trust fund*) dalam perpanjangan MoU.

**7. BP harus bekerja sama dengan PLN dan UP4B untuk memastikan proyek elektrifikasi Teluk Bintuni mencakup area seluas-luasnya dan dapat dilaksanakan secepatnya.**

Tanggapan BP:

Proyek pasokan listrik pertama ke Bintuni akan mengalirkan 4-8MW listrik untuk Kabupaten Teluk Bintuni. Infrastruktur, kapasitas dan perencanaan PLN akan menentukan jaringan distribusi listrik tersebut. Dalam Kesepakatan Pembelian Produksi Pertambangan (SOA), kami menyebutkan bahwa DAV, kota Bintuni dan Babo harus diutamakan untuk mendapatkan pasokan listrik. PLN berkomitmen mengalirkan listrik pada Februari 2013 dan Tangguh telah menyiapkan fasilitas untuk mentransmisikan listrik yang akan siap sebelumnya. Kami akan terus berkoordinasi dengan PLN dan UP4B untuk memantau perkembangan proyek ini.

**Rekomendasi: Ketenagakerjaan dan Pelatihan Penduduk Asli Papua**

**1. BP harus menyediakan pekerjaan di luar Tangguh untuk pekerja DAV yang direlokasi sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko. Pekerja yang diberhentikan harus diberikan pesangon dan penduduk asli Papua harus diutamakan untuk dipekerjakan kembali.**

Tanggapan BP:

Untuk memastikan manajemen risiko berkelanjutan, jumlah karyawan yang dipekerjakan di kilang Tangguh akan didasarkan pada kebutuhan operasional. Kami tengah mencari cara untuk mempekerjakan kembali pekerja (jika dibutuhkan) untuk posisi lain di luar kilang LNG sebagai bagian dari upaya menyediakan mata pencaharian berkelanjutan bagi masyarakat DAV. Sebagai contoh, beberapa petugas keamanan telah dipekerjakan kembali dan direlokasi untuk melaksanakan tugas ICBS di berbagai desa berdasarkan rotasi.

Jika ada karyawan yang diberhentikan di masa depan, pesangon dan tunjangan lain akan diberikan sesuai ketentuan hukum, sementara karyawan yang dipekerjakan kembali di masa depan akan dipilih berdasarkan kemampuan atau kewarganegaraan/etnis jika lowongan tersebut termasuk posisi yang disediakan untuk penduduk asli Papua. Posisi yang tidak membutuhkan keterampilan atau sedikit keterampilan akan diperuntukkan bagi penduduk asli Papua dari DAV dan wilayah Kepala Burung; beberapa posisi semi terampil dan posisi yang membutuhkan keterampilan juga akan diprioritaskan bagi penduduk asli Papua.

**2. Pelatihan bahasa Inggris bagi personel asli Papua di kilang LNG sangat berguna bagi penduduk asli Papua yang ingin maju. BP harus melanjutkan program ini dan mengatur kelas untuk mengakomodasi jadwal kerja panjang yang harus dipenuhi para teknisi tersebut.**

Tanggapan BP:

Kami setuju. Program pelatihan ini telah membantu teknisi dan pekerja lain di kilang. Sesuai komitmen kami terhadap pengembangan lokal, kami kini juga menyediakan kursus bahasa Inggris bagi pegawai magang.

Kontrak baru untuk memperpanjang program tersebut di seluruh pekerja kilang telah dibuat. BP juga berupaya lebih keras meningkatkan jumlah peserta dari kalangan teknisi dengan menggelar kelas di lokasi yang mudah dijangkau pada jam-jam yang tetap memungkinkan mereka memaksimalkan waktu istirahat.

Beberapa peningkatan lain akan dilaksanakan mulai Januari 2013 seperti komitmen manajer lini untuk menominasikan karyawan untuk mengikuti kursus bahasa Inggris, jadwal pelatihan tahunan yang sinkron dengan pola rota dan waktu kerja serta rangkaian turnamen bahasa Inggris untuk memotivasi peserta.

**3. Perekrutan, retensi dan pemajuan etnis Papua harus tetap menjadi prioritas. BP harus menyediakan peluang dengan tingkat keterampilan lebih tinggi dan menawarkan pelatihan kepada karyawan Tangguh dari Papua dan Bintuni yang menunjukkan tekad untuk sukses di Tangguh.**

Tanggapan BP:

Kami setuju bahwa perekrutan etnis Papua harus diprioritaskan, tapi kami merasa bahwa retensi dan pengembangan karyawan harus didasarkan pada kemampuan. Kami telah mempublikasikan lowongan untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tinggi secara lebih efektif di kilang dan berbagai universitas.

Upaya kami untuk merekrut dan memajukan penduduk asli Papua dan Bintuni ke peran yang membutuhkan keterampilan tinggi difokuskan pada tiga tindakan spesifik: hanya merekrut penduduk asli Papua untuk bekerja sebagai Teknisi Operasional (sejak Gelombang 3); membuka lowongan untuk posisi pengawas dan ketua tim bagi penduduk asli Papua berdasarkan kemampuan; secara aktif mendorong penduduk asli Papua untuk menjadi *Challengers* (pekerja muda dengan program pengembangan khusus) di bagian Operasional, S&OR dan Proyek dengan menawarkan kesempatan magang guna mencapai standar yang dibutuhkan untuk menjadi pekerja *Challenger*.

Sesuai komitmen pengembangan besar kami, kami tak hanya menawarkan pelatihan bagi penduduk asli Papua dan non-Papua yang dipekerjakan BP, tapi juga pelatihan grup untuk membantu penduduk asli Papua dan Bintuni yang kami pekerjakan melalui mitra ketiga (TPC), agar mereka dapat memiliki kemampuan yang dapat dipasarkan. Kami juga telah memulai program pengembangan bagi penduduk asli Papua dan Bintuni yang dipekerjakan oleh kontraktor agar mendapatkan keterampilan dasar di BLKI Sorong. Program ini dapat membantu mereka bersaing mendapatkan pekerjaan di masa depan. Sebuah program lanjutan menawarkan beasiswa bagi individu untuk menyelesaikan program serupa di SMK Migas.

**Rekomendasi: Tata Kelola dan Transparansi**

**1. BP harus meningkatkan dukungannya terhadap pemerintah Papua Barat yang lebih transparan dan akuntabel.**

Tanggapan BP:

Fokus utama kami adalah membangun kapasitas pemerintahan Kabupaten Teluk Bintuni, termasuk dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Di tingkat provinsi, kami bekerja keras meningkatkan hubungan kami dengan pemerintah. Kami menggelar lokakarya transparansi bersama EITI di bulan Juli 2012 yang dihadiri pejabat pemerintah Papua Barat. Ke depannya kami akan bekerja sama dengan mitra ahli untuk menjalankan kegiatan peningkatan pengetahuan yang difokuskan pada transparansi dan akuntabilitas.

**2. BP harus berkonsultasi dengan Bank Dunia untuk menentukan apakah pembaruan Analisis Pengeluaran Papua, terutama untuk Papua Barat dan Teluk Bintuni dapat dilakukan dan bermanfaat.**

Tanggapan BP:

Kami akan mengevaluasi kemungkinan pembaruan Analisis Pengeluaran Papua melalui kemitraan kami dengan organisasi yang berpengalaman dan berpengetahuan luas serta memiliki kredibilitas di bidang ini.

**Rekomendasi: Manajemen Pendapatan**

**1. BP harus membantu pemerintah provinsi seperti saat membantu pemerintah kabupaten dalam merancang perdasus yang mengakomodasi kepentingan semua pihak.**

Tanggapan BP:

Kami setuju. Kami akan mendukung pemerintah provinsi dengan meminta UNIPA menyediakan kajian ilmiah yang dibutuhkan untuk membuat perdasus. Kajian ini akan mencakup analisis sosial dan hukum yang komprehensif dan merefleksikan kepentingan pemangku kepentingan utama.

**2. BP harus mendorong semua pihak untuk memasukkan peraturan mengenai pembayaran klaim kepemilikan adat ke dalam perdasus.**

Tanggapan BP:

Kami mendukung ide ini melalui penyusunan kajian ilmiah yang disiapkan oleh UNIPA untuk persiapan pembuatan perdasus.

**3. BP harus mendorong pihak-pihak terkait agar perdasus memuat langkah-langkah yang menjamin peningkatan transparansi dan akuntabilitas menyangkut dana yang dialokasikan.**

Tanggapan BP:

Kami mendukung langkah ini dan sebagai penanda tangan EITI, kami yakin transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik akan bermanfaat bagi semua pihak.

**Rekomendasi: Lingkungan**

**1. BP harus menargetkan status emas (*Gold*) dalam penilaian lingkungan yang dilakukan oleh KLH.**

Tanggapan BP:

KLH menggunakan metode evaluasi (*Proper*) yang sangat ketat yang membutuhkan kepatuhan 100% untuk mencapai status hijau (*Green*). Kami akan melakukan yang terbaik untuk mencapai status hijau pada tahun 2013 kemudian mempertahankannya selama 3 tahun berturut-turut untuk mendapatkan status emas.

**2. Dukungan berkelanjutan untuk kegiatan perencanaan tata ruang kabupaten harus mencakup kepatuhan terhadap rencana penggunaan lahan yang melindungi lingkungan Teluk Bintuni.**

Tanggapan BP:

Kami telah membantu pengembangan dokumen perencanaan tata ruang Kabupaten Teluk Bintuni yang telah disahkan sebagai peraturan daerah sejak Juli 2012. Hal ini mencakup penggunaan lahan untuk perlindungan lingkungan.

**3. Daerah penangkapan ikan, udang dan kepiting di Teluk Bintuni serta potensi kontaminan harus dites dan dilaporkan secara berkala sepanjang operasi di Tangguh.**

Tanggapan BP:

Kami setuju. Kami menguji daerah penangkapan ikan, udang dan kepiting di Teluk Bintuni secara berkala. Kami akan melakukan tes berikutnya di semester pertama 2013. Tangguh juga akan memonitor kualitas air limbah untuk memeriksa potensi kontaminan secara berkala sesuai persyaratan pemerintah Indonesia serta menguji kualitas air laut di sekitar wilayah Tangguh.

**Rekomendasi: Ekspansi Tangguh**

**1. BP harus melakukan lebih banyak hal untuk menanggapi ketidakseimbangan perumahan dan infrastruktur di DAV di pesisir utara dan selatan dalam AMDAL yang baru.**

Tanggapan BP:

Kami sedang mempelajari dan mencoba beberapa cara untuk mengatasi masalah ini melalui kemitraan kami dengan pemerintah lokal dan pusat. Hal ini juga merupakan salah satu pertimbangan penting dalam AMDAL Pengembangan Tangguh yang tengah berjalan.

**2. BP harus berkomitmen menambah tenaga kerja asli Papua agar tiap keluarga Papua di DAV berpeluang memiliki anggota keluarga yang bekerja di BP atau mitranya. Jika jumlah pekerjaan yang tak membutuhkan keterampilan tidak cukup untuk memenuhi target ini selama ekspansi berjalan, penduduk asli Papua dari DAV harus dilatih untuk pekerjaan yang membutuhkan sedikit keterampilan.**

Tanggapan BP:

Kami berkomitmen membantu masyarakat lokal Papua untuk mengembangkan keterampilan yang dapat ditransfer melalui operasi dan pengembangan kami saat ini. Proyek Tangguh telah mengirim 29 pekerja Papua dari DAV yang dipekerjakan oleh kontraktor untuk menjalani pelatihan keterampilan sebelum konstruksi pengembangan Tangguh dimulai. Kami akan menerapkan strategi perekrutan dan pengembangan yang dapat memenuhi kebutuhan proyek dan membantu meningkatkan kapasitas lokal dalam proses AMDAL. Hal ini akan mencakup perekrutan di Tangguh dan pilihan mata pencaharian lain yang dapat membantu pembangunan sosial dan ekonomi serta menjamin keberlanjutan Operasi Tangguh.

**3. BP harus mempertimbangkan menggunakan gas Tangguh atau cadangan listrik untuk proyek elektrifikasi Papua Barat yang lebih luas sebagai tujuan jangka panjang.**

Tanggapan BP:

Kami setuju. Sebagai bagian dari Rencana Pengembangan Lanjutan (POFD) untuk Tangguh Train-3 yang saat ini tengah menunggu persetujuan pemerintah Indonesia, kami akan mengalokasikan 15 mmscf gas Tangguh untuk menyediakan energi bagi proyek listrik yang lebih luas di wilayah Provinsi Papua Barat bila Train-3 sudah mulai beroperasi.



### Action Status on 2011 TIAP Recommendations

As of October 2012

Masalah	Temuan dan Rekomendasi	Tanggapan BP	Status Tindakan
<b><u>Keamanan dan ICBS</u></b>	1. Jika TNI dan Kepolisian meminta bantuan materi dan keuangan, BP wajib menjelaskan bahwa mereka tidak bisa menyediakan dana atau perlengkapan baik kepada tentara TNI atau polisi, dan bahwa semua dukungan sudah sesuai dengan prosedur dalam perjanjian JUKLAP/PAMBERS dan persetujuan BP Migas. BP harus memastikan dengan BP Migas, komitmennya untuk memuat berbagai pembayaran kepada kepolisian Papua di situs webnya.	Kami setuju. Kami telah beroperasi menurut JUKLAP/PAMBERS (Petunjuk Lapangan untuk Pengamanan Bersama) yang membutuhkan persetujuan BP MIGAS sebelum bantuan dalam bentuk materi dan dana diberikan kepada kepolisian atau TNI. Sebelum mempublikasikan detail pembayaran kami, kami meminta persetujuan BP MIGAS.	Mekanisme tersebut tengah diterapkan untuk memastikan transparansi
	2. BP harus bekerja sama dengan kepolisian dan TNI untuk memastikan bahwa unit tentara atau kepolisian yang ditempatkan di Tangguh dalam keadaan darurat menerima pelatihan secara berkala mengenai prinsip HAM dalam Prinsip Sukarela seperti yang diwujudkan JUKLAP/PAMBERS.	Sejak tahun 2006, kami telah mengadakan pelatihan tanggap darurat secara tahunan dengan pihak kepolisian dan TNI yang ditempatkan di Tangguh dan hal ini akan terus dilanjutkan di masa yang akan datang untuk memastikan prinsip HAM dalam Prinsip Sukarela dimengerti oleh kepolisian atau TNI. Pelatihan ini dimasukkan dalam Rencana Tahunan Keamanan Tangguh. Namun, kami menyadari sepenuhnya bahwa rotasi personel kepolisian dan TNI di luar kendali atau pengawasan Tangguh. Oleh karena itu, kami berharap dengan melakukan pelatihan secara berkala, kami dapat melatih para personel baru.	Pelatihan tentang asas HAM diselenggarakan tahun 2011 dan 2012 melibatkan kepolisian dan militer di wilayah Fak Fak dan Bintuni.

Masalah	Temuan dan Rekomendasi	Tanggapan BP	Status Tindakan
	3. BP harus terus menyelenggarakan latihan bersama tahunan dengan kepolisian seperti yang digariskan oleh JUKLAK/PAMBERS dan melibatkan tentara dan LSM HAM sebagai pengamat. BP harus melibatkan pengamat untuk melakukan evaluasi pelatihan. Keamanan BP harus bekerja sama dengan Kapolda untuk mengembangkan prosedur simulasi manajemen krisis dan menguji prosedur tersebut selama pelatihan.	Kami setuju. Kami telah mengadakan latihan bersama tahunan sejak 2006 dan akan terus berlanjut di masa mendatang. Latihan terakhir dilaksanakan pada Desember 2010. Latihan tersebut melibatkan sekitar 200 orang, termasuk personel TNI dan kepolisian serta perwakilan media dan LSM HAM. Latihan ini terdiri dari skenario simulasi yang dibuat Kapolda untuk menilai kesiapan tim untuk menangani situasi konflik. Latihan bersama tahunan ini masuk dalam Rencana Tahunan Keamanan Tangguh dan latihan berikutnya dijadwalkan pada kuartal keempat 2011.	Selama 2011, pelatihan tidak bisa diadakan karena tidak adanya personel kepolisian yang disebabkan meningkatnya ketegangan politik saat pemilihan gubernur Papua dan Papua Barat serta meningkatnya ketegangan di Bintuni dari berlarut-larutnya pembahasan proses pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi. Kami akan kembali mengadakan latihan bersama pada November 2012.
	4. BP harus mendorong BPMIGAS dan kedua gubernur di Papua untuk meminta semua perusahaan minyak dan gas yang beroperasi di Papua menerapkan prosedur keamanan yang serupa dengan ICBS.	Kami setuju. Kami secara berkala melibatkan BPMIGAS, Gubernur Papua dan Papua Barat, dan juga Kapolda Papua dalam diskusi mengenai kegiatan ICBS kami. BPMIGAS telah mengadopsi ICBS JUKLAP pada tingkat nasional untuk seluruh kegiatan minyak dan gas. Kami akan terus berkomunikasi dengan BPMIGAS, Gubernur Papua dan Papua Barat serta Kapolda untuk secara aktif memperkenalkan pendekatan serupa dengan keamanan di Tangguh.	Diskusi dan komunikasi mengenai ICBS dengan pemangku kepentingan yang relevan (kepolisian lokal) tengah berjalan.
<b><u>Keamanan dan Pembangunan Papua</u></b>	5. BP harus mencegah migrasi dengan membatasi perekrutan untuk dilakukan oleh pusat tenaga kerja di daerah sekitar di luar Tangguh, selain daripada merekrut orang-orang dari daerah yang terkena dampak langsung (DAV). BP juga harus memastikan bahwa orang Papua yang direkrut adalah penduduk asli Papua.	Kami selalu memerhatikan masalah migrasi penduduk dan konsekuensinya, ketika TIAP pertama kali mengidentifikasinya sebagai risiko utama. Untuk menanggulangi risiko, kami telah mengambil langkah untuk memberi pendidikan bagi pejabat lokal dan anggota komunitas sebagai bagian dari upaya kami melakukan kontrol migrasi penduduk melalui program tata kelola pemerintahan kami.  Meningat Tangguh telah memasuki fase operasional, kami telah menyesuaikan proses perekrutan kami (dan kontraktor kami) untuk	Prioritas untuk merekrut penduduk asli Papua untuk kegiatan operasional dan pengeboran di Tangguh masih berlangsung dan ditangani oleh divisi WFM. Data September lalu menunjukkan 16% pegawai di Tangguh berasal dari daerah yang terkena dampak secara langsung (DAV) dan 4 orang di antaranya berada di level manajerial.  Pendekatan serupa juga akan

Masalah	Temuan dan Rekomendasi	Tanggapan BP	Status Tindakan
		<p>memprioritaskan lamaran dari penduduk DAV, terutama yang terdaftar dalam sensus 2002 jika memungkinkan dan tanpa mengkompromikan tingkat keterampilan yang dibutuhkan dan kriteria pengalaman.</p> <p>Kami juga mengadakan pelatihan peningkatan ketrampilan untuk pekerja Papua yang memiliki sedikit ketrampilan untuk meningkatkan keahlian mereka.</p>	diterapkan untuk appraisal dan proyek Ekspansi Pengembangan Tangguh.
	<p>6. Komite Pembangunan Pengembangan Papua harus fokus dalam mengembangkan keahlian para pegawai dan teknisi asli Papua di Tangguh. Pelatihan harus diberikan dan/atau harus ada upaya untuk meningkatkan perhatian dari manajemen tingkat atas dan menengah untuk membantu teknisi Papua meningkatkan kemampuannya. Target tahunan untuk perekrutan, pelatihan dan pengembangan kemampuan teknisi Papua harus ditetapkan untuk memastikan komitmen AMDAL terpenuhi.</p>	<p>Kami setuju. Kami saat ini telah menyiapkan strategi dan menyetujui program tahunan dan berencana memenuhi target perekrutan untuk posisi manajerial, pengawas dan tenaga ahli, yang terbukti menjadi lowongan yang paling sulit untuk diisi tenaga kerja lokal. Strategi ini meliputi pengembangan tenaga kerja yang ada, perekrutan pegawai kontrak BP, investasi di bidang pendidikan dan kerja sama dengan institusi lain untuk mencari bakat-bakat muda.</p>	Kemajuan sudah berjalan sesuai rencana dan BP tengah menerapkan strategi pengembangan staf Papua.
	<p>7. BP harus bekerja sama dengan kontraktor untuk meningkatkan jumlah pegawai lokal yang direkrut dan memastikan terpenuhinya komitmen AMDAL di bidang ketenagakerjaan. Jika target merekrut penduduk asli Papua tidak terpenuhi, maka BP harus meningkatkan upaya perekrutan putera asli daerah Papua. Jika kantor tenaga kerja di Bintuni mampu merekrut orang lokal, BP harus memperluas kegiatan</p>	<p>Kami setuju. Kontrak kami dengan semua kontraktor di Tangguh telah mewajibkan mereka untuk memenuhi kriteria perekrutan penduduk lokal. Kami tengah mengadakan dialog dengan kontraktor untuk memastikan mereka bisa memenuhi kriteria tersebut. Saat ini BP dan para kontraktor kami telah memenuhi atau melampaui target. Kami juga menjalankan program magang untuk mendukung upaya kontraktor merekrut orang Papua yang berkualitas.</p>	<p>Kemajuan sudah sesuai dengan target.. Pencapaian kesepakatan kontrak mengenai rekrutmen lokal adalah bagian dari evaluasi periodik kontraktor. Kami secara dekat mengawasi kontraktor dalam mencapai target sesuai kontrak.</p> <p>Sementara itu program magang telah merekrut lima angkatan yang terdiri dari 73 peserta</p>

Masalah	Temuan dan Rekomendasi	Tanggapan BP	Status Tindakan
	<p>perekrutan di lokasi lain di Teluk Bintuni.</p>		<p>magang untuk masa pelatihan kerja selama enam bulan dan setelahnya mereka dapat dipekerjakan oleh kontraktor atau BP.</p> <p>Sebanyak 32 peserta magang telah direkrut BP dan kontraktornya sementara 17 peserta magang dari angkatan ke 5 masih menjalani pelatihan hingga Oktober 2012.</p>
	<p>8. BP harus mencantumkan kewajiban pengadaan lokal, sama dengan yang tertera di kontrak Indocater, dalam semua pengadaan untuk Tangguh jika memungkinkan. Jika pengadaan produk ikan, udang atau produk lain dari penjual lokal tidak memungkinkan, maka kontraktor diwajibkan menggunakan produk dari daerah tersebut atau menjelaskan mengapa pengadaan itu tidak mungkin.</p>	<p>Kami akan berusaha menggunakan lebih banyak lagi produk pangan dan ikan lokal dengan memasukkan kriteria pengadaan lokal dalam kontrak catering kami. Saat ini, kontraktor catering kami membeli daging sapi dari Sorong karena daging ini tidak tersedia di Teluk Bintuni. Kami terus meningkatkan kapasitas kontraktor dan pemasok lokal melalui Program Pemberdayaan Usaha Kawasan Kepala Burung.</p>	<p>Perkembangannya sesuai harapan. Produk lokal Papua sudah dimasukkan dalam persyaratan dalam kontrak operasi Tangguh serta kontrak pengeboran.</p>

Masalah	Temuan dan Rekomendasi	Tanggapan BP	Status Tindakan
<b><u>Program Sosial Terpadu</u></b>	9. Mengingat tidak adanya media yang efektif atau masyarakat sipil di wilayah ini, BP harus lebih aktif mempublikasikan dan mengomunikasikan manfaat program-programnya bagi pengembangan sumber daya manusia Papua, peningkatan kualitas hidup, pendidikan dan kesehatan serta efektivitas ICBS untuk penyelesaian sengketa secara damai.	Kami setuju. Tangguh telah menerbitkan koran bulanan KADATE yang memuat artikel seputar kegiatan sosial kami dan menjelaskan manfaat program ISP kami. Koran tersebut juga diterbitkan di papan buletin DAV dan RAV dan dikirim ke pemangku kepentingan lain seperti universitas, LSM dan kantor pemerintahan di Papua dan Jakarta.	Tim kami terus mengkomunikasikan dan memperbarui informasi seputar kegiatan Tangguh termasuk ISP program dan keunggulannya. Informasi juga disebarluaskan melalui majalah internal dan papan pengumuman yang ada di tingkat kampung. Kami sudah mulai menyediakan informasi seputar program sosial Tangguh di beberapa media/majalah nasional (Tempo, Jakarta Now dan Seputar Indonesia).
	10. Program Pemberdayaan Usaha Bisnis di Kawasan Kepala Burung (BHEBP) harus dilanjutkan untuk jangka panjang dan disesuaikan secara berkala pada beberapa aspek program tersebut yang paling efektif membawa bisnis baru ke dalam rantai suplai Tangguh.	Kami sepakat bahwa upaya memberdayakan usaha lokal dalam program ini harus berlanjut karena telah mencapai hasil yang nyata, membantu memberdayakan dan menumbuhkan usaha lokal. Kami telah menunjuk KADIN di Papua untuk memimpin pelaksanaan program BHEBP.	BHEBP melanjutkan program-programnya dengan memberikan bantuan teknis tentang bisnis dan manajemen kepada perusahaan lokal, bekerja sama dengan pihak KADIN lokal. Sebagai hasilnya, jumlah pendapatan kontrak meningkat dari Rp290 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp367 miliar di tahun 2011.  Contohnya, pemenang proyek tempat pembuangan akhir, PT ITP, adalah perusahaan lokal yang berlokasi di Manokwari.

Masalah	Temuan dan Rekomendasi	Tanggapan BP	Status Tindakan
	<p>11. Pengembangan usaha dan kredit usaha kecil di Teluk Bintuni penting bagi rumah tangga yang berkelanjutan dan ekonomi mandiri. BP harus menambah program dengan meningkatkan upaya untuk membangun struktur yang dapat menghubungkan pembeli potensial di luar Teluk dengan produsen lokal, terutama produsen ikan dan udang.</p>	<p>Program mata pencaharian Tangguh meliputi unsur yang bertujuan memberdayakan koperasi dan unit kredit usaha kecil untuk mengembangkan bisnisnya dan membuat rantai nilai di desa kampung-kampung lokal dan calon pembeli produk dan jasa mereka di luar Teluk.</p>	<p>Perkembangannya sesuai harapan. Perhatian yang tinggi terus diberikan kepada usaha masyarakat di Teluk Bintuni yang memiliki peluang lebih besar untuk dikembangkan lebih jauh.</p> <p>Ada 9 koperasi dan 7 unit kredit yang mendukung dan menciptakan rantai nilai dengan mengumpulkan produk dari para petani dan nelayan untuk dijual di luar kampung mereka. Mereka mendapat pelatihan dan bimbingan mengenai bisnis dan manajemen melalui program mata pencaharian.</p>
<b>Hak Asasi Manusia</b>	<p>12. Pengenalan UU Minyak dan Gas dan forum keamanan harus dilakukan di daerah yang terkena dampak langsung dan masyarakat lokal secara berkala. BP harus sepenuhnya mensosialisasikan cara menyampaikan keluhan di tiap forum keamanan yang ada di masyarakat lokal.</p>	<p>Kami setuju. Kami terus mengingatkan masyarakat local mengenai prosedur penyampaian keluhan di forum keamanan dan mendorong mereka memanfaatkan sarana ini untuk menyampaikan keluhan mereka.</p>	<p>Perkembangannya sesuai harapan. Sosialisasi mengenai cara menyampaikan keluhan dan UU Minyak dan Gas, khususnya mengenai langkah keamanan yang telah diterapkan secara rutin di masyarakat melalui forum keamanan di kampung-kampung.</p>
	<p>13. BP wajib meninjau kembali prosedur yang relevan dalam proses penyampaian keluhan masyarakat, berkonsultasi dengan kepala adat dan menyederhanakan prosesnya jika perlu. Perlu ada sosialisasi lebih mengenai tata cara menyampaikan keluhan secara lisan.</p>	<p>Kami setuju. Kami telah merevisi prosedur penyampaian keluhan, untuk memudahkan penduduk desa menyampaikan keluhan secara lisan lewat kepala desa, yang akan mencatat keluhan tersebut, menindaklanjuti dan melaporkan kembali ke individu yang menyampaikan keluhan tersebut.</p>	<p>Perkembangannya sesuai harapan. Sistem penyampaian keluhan sudah disosialisasikan kepada masyarakat dan digunakan oleh masyarakat. Tim kami juga memastikan bahwa setiap keluhan akan ditanggapi secara cepat. Hasil pantauan terbaru menunjukkan sebanyak 30 keluhan, termasuk keluhan</p>

Masalah	Temuan dan Rekomendasi	Tanggapan BP	Status Tindakan
			secara lisan telah diterima selama periode Januari-September 2012.
	14. BP harus mendukung pekerjaan pengacara HAM paruh waktu di Bintuni. Pengacara HAM harus berpartisipasi dalam forum keamanan masyarakat yang diadakan BP.	Bersama LSHAM, organisasi HAM di Papua, kami menyediakan bantuan bagi 30 advokat HAM untuk mengambil sertifikat pengacara di Manokwari. Saat ini kami fokus memperkuat aktivitas tersebut untuk memasukkan sarjana hukum dari Bintuni. Melalui program ini, diharapkan masyarakat mempunyai pengacara publik dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Bintuni akan hak hukum mereka, termasuk hak asasi mereka.	LP3BH memproses wisuda 17 pengacara awal Juli 2012 di Manokwari. LP3BH juga telah membuka Pusat Bantuan Hukum untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat Bintuni.
<b><u>Tata Kelola dan Manajemen Pendapatan</u></b>	15. BP harus mempertahankan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat sipil di tingkat desakampung, kabupaten dan propinsi. Program ini harus ditinjau kembali untuk penilaian kinerja dan dimodifikasi sesuai kebutuhan.	Kami sepakat. Program Tata Kelola kami bertujuan meningkatkan kapasitas pemerintahan dan masyarakat sipil di tingkat kampung, kabupaten dan propinsi. Kami mengevaluasi efektivitas program tiap kuartal dan ikut menyelesaikan masalah yang ada. Pada level strategis, Panel Eksternal dari Pemberi Pinjaman akan meninjau kembali seluruh program ISP tahun 2013 untuk menilai efektivitas program dan pada saat itu kami akan memodifikasi rencana kami jika perlu. Dengan beroperasinya Tangguh, kami juga mendorong pihak-pihak luar, termasuk pemerintah daerah dan lembaga donor, untuk bergabung dengan kegiatan kami untuk menumbuhkan rasa kepemilikan dan memastikan keberlanjutannya.	Perkembangannya sesuai harapan. Kami telah melakukan penilaian terhadap strategi program tata kelola dan bertujuan melakukan pendekatan menyeluruh untuk meningkatkan efektivitas program.

Masalah	Temuan dan Rekomendasi	Tanggapan BP	Status Tindakan
	16. Di desa kampung-kampung yang terkena dampak langsung (DAV), BP harus memberikan pelatihan dan dukungan bagi pengambilan keputusan desa ditingkat kampung dalam penggunaan dana Rencana Kerja Masyarakat (CAP) hingga berakhir tahun 2015.	Kami setuju. Perencanaan dan pengambilan keputusan berkaitan dengan dana, baik untuk dana CAPs BP atau lainnya, masuk dalam ruang lingkup program tata kelola pemerintahan kami.	Pelatihan dan dukungan terhadap PBM di DAV tengah dilakukan.
	17. BP harus bekerja sama dengan pemerintahan kabupaten untuk merumuskan kebijakan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan rencana pembangunan untuk setiap kampung, termasuk program musyawarah pembangunan desa (Musbangdes), Rencana Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK) yang dicanangkan Gubernur dan pendanaan CAP BP.	Kami setuju. Melalui program tata kelola pemerintah ini, kami bertujuan menintegrasikan sesi perencanaan untuk dana dari Tangguh dan dana dari pemerintah. Kami telah berupaya meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dan perencanaan perwakilan masyarakat desa dalam program pendanaan CAPS. Sebagai hasilnya, Tofoy, Tomu dan Ekam sekarang sudah mampu memfasilitasi dan menjalankan sesi perencanaan. Kami berencana memperluas proses yang mereka gunakan di CAP untuk juga mencakup dana pemerintah.	Perencanaan anggaran terpadu telah diujicobakan di beberapa desa, termasuk Tomu, Ekam dan Saengga. Program tersebut akan dilaksanakan di wilayah DAV lainnya dengan mengikuti agenda dan jadwal pemerintah.
	18. Untuk level kabupaten, BP perlu mempertimbangkan bekerja sama dengan mitra lain yang memiliki spesialisasi dalam pelatihan administrasi publik untuk memberi pelatihan kepada pejabat lokal senior dan pimpinan dalam masyarakat sipil.	Kami mempunyai ikatan kontrak untuk program tata kelola pemerintahan dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM) dan LSM lokal MCC untuk memberikan pelatihan administrasi publik, sebagai hasil tender terbuka. Keduanya memenuhi persyaratan teknis dalam tender ini.	Pekerjaan PSKK UGM di bidang pemerintahan di tingkat kabupaten mengalami kemajuan. Pantauan terakhir menunjukkan beberapa pelatihan dan bimbingan telah diluncurkan untuk pejabat daerah di kabupaten, kecamatan, dan kampung untuk meningkatkan kapasitas dalam peran mereka memberikan pelayanan publik yang baik termasuk perencanaan dan penganggaran dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Masalah	Temuan dan Rekomendasi	Tanggapan BP	Status Tindakan
			Kami telah melakukan penilaian strategi program pemerintahan dan bertujuan untuk melakukan pendekatan menyeluruh untuk meningkatkan efektivitas program.
	19. BP harus menjadikan pemerintah daerah Manokwari sebagai fokus kedua program tata kelola pemerintahan. BP perlu secara reguler mensponsori aktivitas tata kelola pemerintahan yang baik dan kegiatan anti korupsi, seperti seminar tahun 2008 di Manokwari dengan KPK. Seluruh aktivitas ini harus dikordinasikan dengan pemerintah provinsi dan/atau DPRD.	Saat ini, kami ingin memfokuskan program kami di wilayah Bintuni sebagai pemangku kepentingan utama di wilayah operasional BP. Kami yakin bahwa peningkatan kemampuan pejabat lokal sangat penting untuk memastikan manfaat Tangguh bagi masyarakat setempat. Kami setuju bahwa Manokwari penting sebagai penghubung administrasi dengan Bintuni dan kami terus berusaha meningkatkan kesadaran pemerintah lokal Manokwari terhadap tata kelola yang baik. Contohnya, di awal 2011 kami menyelesaikan lokakarya mengenai aliran dana minyak dan gas di Manokwari.	Fokus program pemerintahan di Papua Barat adalah memberikan pengetahuan; kami memfasilitasi sosialisasi mengenai aliran penerimaan dari minyak dan gas untuk DPRD Papua Barat di Makasar pada Maret 2012 dan lokakarya mengenai transparansi untuk pejabat lokal Papua Barat dengan EITI pada Juli 2012.
<b><u>Aliran Dana dan Transparansi</u></b>	20. BP harus melanjutkan program tata kelola dan bekerja sama secara erat dengan pemerintah kabupaten untuk menerapkan transparansi anggaran dan pengeluaran, terutama yang ada kaitannya dengan Tangguh.	Kami setuju. Program ini akan berlanjut menjadi upaya utama kami memastikan kelangsungan operasional Tangguh. Melalui program ini, kami mendorong pemerintah kabupaten untuk menerapkan transparansi dalam penganggaran dan pengeluaran. Kami tengah menggali kemungkinan bekerja sama dengan EITI.	Program tata kelola untuk mempromosikan transparansi tengah berlangsung di bawah program pengembangan kapasitas pemerintahan.  Sebagai bagian dari transparansi, BP memfasilitasi pertemuan pada Maret 2012 antara pemerintahan daerah Bintuni dengan Kementerian Keuangan, ESDM, BP MIGAS untuk membahas realisasi dana penerimaan Tangguh 2009-2011 dan target penerimaan periode 2012-2014 untuk Bintuni.

Masalah	Temuan dan Rekomendasi	Tanggapan BP	Status Tindakan
	<p>21. Sebagai bentuk pengakuan atas hak adat seluruh suku dan mempertahankan kegiatan pembangunan masyarakat di kabupaten di luar DAV, BP harus mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mendirikan dana perwalian (<i>trust fund</i>) untuk tujuan ini. Pengalaman pendekatan yang diterapkan oleh Yayasan Dimaga bisa menjadi contoh untuk lembaga baru ini.</p>	<p>Kami mendukung peningkatan kapasitas dan manajemen Yayasan Dimaga untuk memastikan bahwa dana abadi dapat membawa manfaat bagi tiga desa kampung yang diberikan kompensasi oleh Tangguh akibat digunakannya tanah mereka. Sebelum kami mendorong pihak lain melakukan pendekatan serupa, kami masih harus belajar bagaimana membuat program ini berhasil. Setelah kami mempunyai pemahaman yang menyeluruh mengenai tantangan ini dan bisa belajar dari sini maka kami bisa membaginya dengan pemerintah lokal Papua.</p>	<p>Pengembangan kapasitas Yayasan Dimaga tengah berlangsung. Perencanaan dengan anggota Dimaga selesai tahun 2011 begitu juga dengan audit eksternal mengenai pengeluaran tahun tersebut. Laporan mengenai kegiatan tersebut belum dikeluarkan.</p>